

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS H. SAID PADA MASA PANDEMI DI KECAMATAN
TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ASMI PURWANDI

11870513844

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Asmi Purwandi
 NIM : 11870513844
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said Pada Masa Pandemi di Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si

NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui

Dean
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asmi Purwandi
 NIM : 11870521543
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said Pada Masa Pandemi di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
 Tanggal Ujian : 28 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

Sekretaris

H Pratul Aswad, SE, M.Ak

Anggota

Mashuri, MA

Anggota

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asmi Purwandi
 NIM : 11870513844
 Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 21 Juli 2000
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kelompok Kerja Guru (KKG)
 Pada Masa Pandemi di Kecamatan Tembilahan Kabupaten
 Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis skripsi ini dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 November 2022

Yang membuat pernyataan



(Handwritten signature)
 Asmi Purwandi
 11870513844

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS H. SAID PADA MASA PANDEMI DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh :

Asmi Purwandi
NIM. 11870513844

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah suatu organisasi profesi guru yang bersifat non struktural yang, dibentuk oleh guru-guru di Sekolah Dasar, di suatu wilayah atau gugus sekolah, sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Agenda dari kegiatan KKG ini adalah sebagai langkah dalam merespon era disrupsi dan kondisi pendidikan yang aktual. Maka dari itu langkah kebijakan yang di ambil Dinas Pendidikan adalah membuat program Kelompok Kerja Guru (KKG). Tujuan dari program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pribadi guru dan meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang profesional. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi serta tehnik sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan di teliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat di peroleh hasil bahwa implementasi program kelompok kerja guru gugus H. Said mampu mengantarkan seorang guru untuk menjadi lebih percaya diri menggunakan kemampuan yang ada untuk peningkatan mutu pendidikan. Penerapan program ini juga mampu memberikan manfaat dan menciptakan sebuah jalinan kerjasama yang dapat menguntukan kedua belah pihak (guru dan siswa). Dan terbentuknya forum pembelajaran guru yang memfasilitasi lebih lanjut kegiatan peningkatan kompetensi dan kreatifitas guru pada tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Serta Kepemilikan Sertifikasi Tanda Kompetensi.

Kata Kunci : Implementasi Kelompok Kerja Guru, Pandemi covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia –Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menderang saat ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselsaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Bapak Sahril dan Ibunda Irnawati, selalu membimbing dan memberikan semangat, dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu mendoakan Ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr.Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M,Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing akademis yang telah memberikan pembinaan dan arahan selama perkuliahan.
8. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada staf pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Bapak Suhardi dan Ibuk Masria yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Kepada abang kandung terbaik saya abang Madian, S.T yang sudah membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman Devina Dwi Ananda, Wirandi, Hendri, irfan dan Resky terimakasih sudah mensupport. Akhirnya kawan mu sudah sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di titik ini, semoga kalian diberikan kemudahan dan diberi keberkahan dalam hidupnya.

12. Seluruh teman seperjuangan seangkatan, terutama kelas Administrasi Negara kelas D angkatan 2018 yang selalu mengisi hari yang menyenangkan.
13. Seluruh keluarga ketua K3S maupun ketua KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ikut membantu dalam pemberian kesempatan dan waktu untuk penelitian ini.
14. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia, jika aku dapat bangkit dan memberikan bukti.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam jurusan Administrasi Negara.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

Asmi Purwandi
11870513844

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.1.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik	13
2.1.2 Proses Kebijakan Publik	15
2.2 Implementasi Kebijakan	17
2.2.1. Implementasi Model Gorge C. Edward III	19
2.3 Program Kelompok Kerja Guru (KGG)	24
2.3.1. Pengertian Kelompok Kerja Guru	24
2.3.2. Dasar Hukum Kelompok Kerja Guru	24
2.3.3. Tujuan Kelompok Kerja Guru	26
2.3.4. Manfaat Kelomok Kerja Guru	27
2.3.5. Hakikat Kelompok Kerja Guru	28
2.3.6. Pengorganisasian Kelomok Kerja Guru	30
2.3.7. Pengelolaan Kelompok Kerja Guru	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

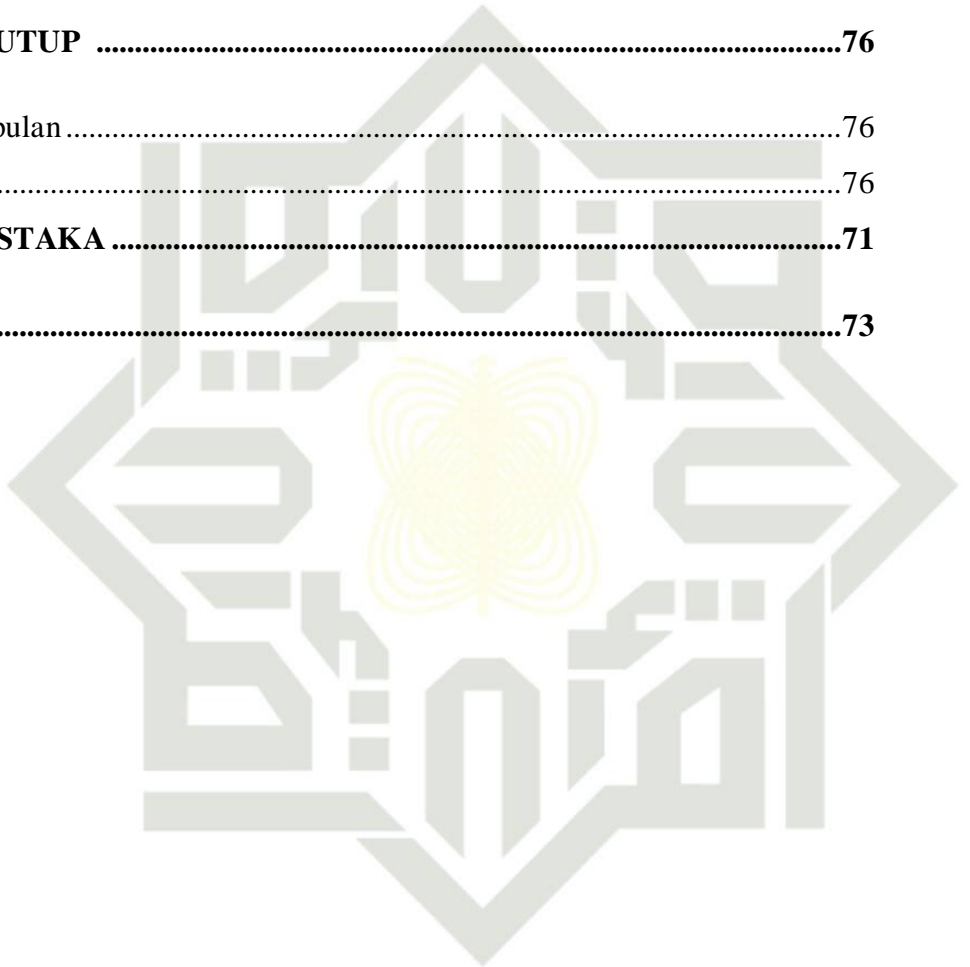
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.8. Pembiayaan Kelompok Kerja Guru	35
2.4 Pandangan Islam Tentang Guru	36
2.5 Kajian Terdahulu	40
2.6 Defenisi Konsep	43
2.7 Konsep Oprasional	44
2.8 Kerangka Berfikir.....	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Subjek Penelitian	47
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	48
3.6 Analisa Data	48
3.7 Validasi Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
4.1 Sejarah.....	50
4.1.1. Visi dan Misi KKG Gugus H. Said.....	51
4.1.2. Maksud dan Tujuan	52
4.1.3. Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said	52
4.1.4. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
5.1 Implementasi Program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said di Kecamatan Tembilahan	60
5.1.1. Komunikasi	61
5.1.2. Sumber Daya	65
5.1.3. Disposisi	68
5.1.4. Struktur Birokrasi.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said Pada Masa Pandemi di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	72
5.2.1. Faktor Internal	72
5.2.2. Faktor Eksternal	74
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

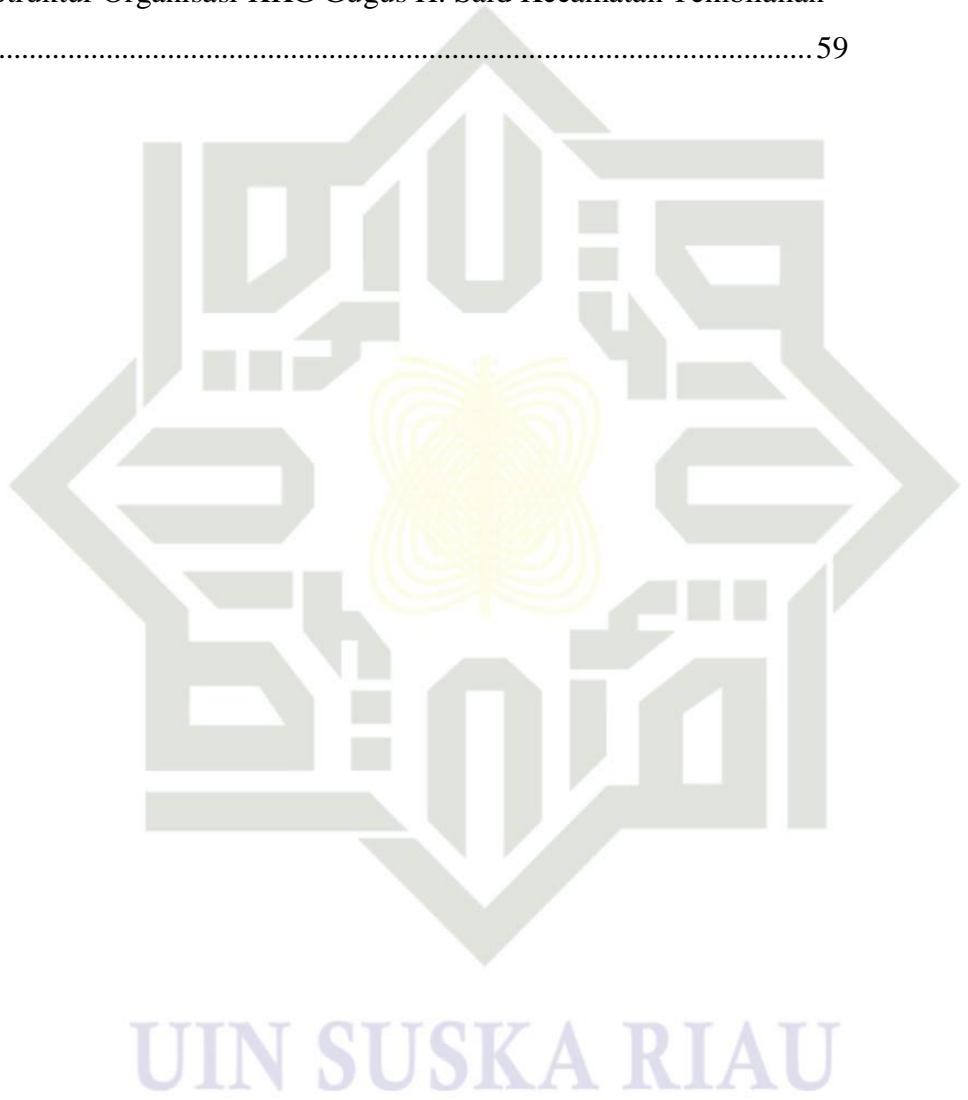
Tabel 1.1	Susunan Panitia KKG Pelatihan Guru Inspiratif	4
Tabel 1.2	Materi dan Jam Pelajaran KKG Pelatihan Guru Inspiratif	5
Tabel 1.3	Peserta KKG Pelatihan Guru Inspiratif	6
Tabel 1.4	Peserta Tambahan KKG Pelatihan Guru Inspiratif	7
Tabel 2.1	Kajian Terdahulu	40
Tabel 2.2	Indikator Penelitian	44
Tabel 3.1	Informan Peneliti	47
Tabel 4.1	Susunan Program Kelompok Kerja Kepala Sekolah Gugus H. Said ..	53
Tabel 4.2	Susunan Program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said	54
Tabel 4.3	Susunan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Gugus H. Said	55
Tabel 4.4	Susunan Bidang Pengembangan Organisasi dan Sarpras Gugus H. Said	55
Tabel 4.5	Susunan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Gugus H. Said	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indikator Penelitian	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKKS (K3S) Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan khususnya di Sekolah Dasar merupakan fokus perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal pertama yang mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar.

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi focus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. (Fattah, 2006: 1).

Keberadaan kegiatan KKG merupakan bagian yang integral dari perwujudan system pembinaan kompetensi guru, yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan peningkatan mutu pendidikan, kemampuan professional guru. Kegiatan KKG merupakan kegiatan yang sudah diprogramkan dari pembuat keputusan, dalam hal ini pemerintah. Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan kegiatan KKG harus dijalankan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru. Karakteristik yang perlu dikembangkan di setiap daerah perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sehingga KKG dapat bermanfaat bagi guru, sehingga meningkatkan nilai kompetensi yang dimiliki seorang guru yang maranya akan memunculkan kualitas pendidikan secara umum setelah mengikuti KKG.

Guru merupakan salah satu unsur penting di bidang pendidikan yang berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang (Khasanah et al., 2018). Oleh karena itu guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus.

Merespon Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia dengan tembusan yang diberikan kepada Menteri Agama, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Seluruh Kepala Satuan Pendidikan;

Latar belakang dari agenda ini sebenarnya adalah sebagai langkah dalam merespon era disrupsi dan kondisi pendidikan Indonesia yang aktual. Dimana dari data-data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kualitas murid dan guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Asesmen Nasional 2021 adalah melakukan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah,

yang tujuannya adalah mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Adapun manfaat dari pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pribadi guru dan meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang professional.

Dengan adanya Program KKG melalui Pelatihan Guru Inspiratif akan mengantarkan seorang guru untuk mendapatkan motivasi yang tepat dalam menjalani pekerjaannya menjadi seorang pendidik. Pembelajaran melahirkan ide-ide kreatif dan penuh inspirasi yang merupakan katalis bagi terjadinya perubahan mendasar terhadap peran guru dari informasi ke transformasi. Setiap sistem sekolah harus bersifat moderat terhadap teknik pembelajaran yang menunjang mereka untuk belajar dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih cerdas.

Dalam surat edaran Mendikbud Nomor Tahun 2020 mengenai pembelajaran di masa pandemi, tertulis bahwa pembelajaran tidak harus menuntaskan kurikulum. Pembelajaran yang di sajikan merupakan pembelajaran bermakna dan memuat kecakapan hidup. Surat edaran tersebut di keluarkan ketika akhir tahun ajaran. Namun, sebagai guru harus bisa menyikapinya ketika tahun ajaran baru telah datang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan wadah yang tepat untuk berdiskusi menghadapi permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP (Kemdiknas, 2010: 10) bahwa hasil dari kegiatan KKG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.

Melalui gotong royong yang dilakukan di dalam forum KKG, berbagai kendala yang dihadapi guru dapat teratasi. Saling berbagi pengalaman, saling memberi masukan, serta saling bertukar pikiran dalam mencapai kesepakatan yang dapat digunakan oleh semua pihak. Tidak lupa dukungan dari Dinas Pendidikan juga dapat memperlancar kegiatan KKG.

Berikut adalah kepengurusan sekaligus panitia kelompok kerja guru yang ada di Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 1.1
Susunan Panitia KKG
Pelatihan Guru Inspiratif
“MEMBENTUK PRIBADI GURU YANG MENGINSPIRASI”

PENANGGUNG JAWAB	:	KETUA GUGUS H. SAID
KETUA	:	SUSANTI S. Pd.SD
SEKRETARIS	:	ERMA HESTINA , S.Pd
BENDAHARA	:	1. ITNAWATI, S.Pd.SD 2. RENI HASNITA, S.Pd.SD
SEKSI ACARA	:	1. NURASIAH, S.Pd 2. ELVI SUSANTI, S.Pd.SD 3. MUSDALIFAH, SE
SEKSI KONSUMSI	:	1. MASRATUL KHAIRIAH, S.Pd.SD 2. MUSLINA, S.Pd.SD
SEKSI HUMAS	:	1. ASNI WIRNA, S.Pd 2. ADE YULIASMA, S.Pd 3. EKARIANSYAH, S.Pd

Sumber Data : KKG Gugus H.said Kecamatan Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada table 1.1 diatas menjelaskan susunan panitia program kelompok kerja guru melalui pelatihan guru inspiratif, yang mana panitia tersebut terdiri dari Ketua KKG, Sekretaris, Bendahara, Seksi Acara, Seksi Humas, dan Seksi Konsumsi.

Dalam pelaksanaan program Pelatihan Guru Inspiratif, kegiatan ini diproyeksikan diadakan selama 2 kali pertemuan dengan 3 sesi acara setiap harinya. Bentuk utama dari pembahasan ini adalah pembahasan materi serta kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mempraktekkan langsung materi yang disampaikan.

Adapun materi dan jam pelajaran pada pelatihan guru inspiratif atau AKM ini adalah sebagai berikut :

Table 1.2
Materi dan Jam Pelajaran KKG
Pelatihan Guru Inspiratif

No	Materi	Jam Pelajaran	
		Teori	Praktek
A.	Umum		
	1. Kebijakan Dinas Pendidikan	2	
B.	Inti		
	1. Sosialisasi dan Pengenalan AKM	2	2
	2. Strategi Penyelesaian Soal AKM	2	
	3. Analisa dan Praktek Penyusunan Soal AKM	4	6
	4. Kurikulum Paradigma Baru	2	2
	5. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	3	
	6. Merdeka Belajar	2	
	7. Profil Pelajar Pancasila	3	
C.	Penunjang		
	1. Evaluasi dan Refleksi	2	
	Jumlah Pelajaran	22	10
	Total Jam Pelajaran	32	

Sumber Data : KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan

Pada table 1.2 diatas menjelaskan tentang materi dan jam pelajaran KKG Pelatihan guru inspiratif atau disebut juga dengan AKM (Asemen Komepetensi Minimum).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada pun Jumlah peserta KKG pelatihan guru inspiratif adalah **23 orang**, yang

terdiri :

Table 1.3
Peserta KKG Pelatihan Guru Inspiratif

No	Nama Sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 009 Tembilahan Kota	3 Orang
2.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 023 Tembilahan Kota	3 Orang
3.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 019 Sungai Beringin	3 Orang
4.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 011 Pekan Arba	1 Orang
5.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 012 Pekan Arba	2 Orang
6.	Sekolah Dasar IT Nomor 036 Faturrahman Tembilahan	3 Orang

Sumber Data : KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan

Pada table 1.3 menjelaskan tentang peserta yang mengikuti kegiatan program KKG di Gugus H. Said, SDN 009 Tembilahan Kota menjadi SD inti di Kegiatan Program KKG ini. Yang mana SD inti ini adalah satu SD yang dipilih diantara anggota gugus yang mempunyai peranan sebagai pusat pengembangan pada tingkat gugus dan secara institusional memiliki sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan/guru yang menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di gugus tersebut. Sedangkan seperti SD yang lainnya itu disebut SD imbas, SD imbas ini adalah sekolah yang menjadi anggota suatu gugus. SD imbas ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem gugus. Sebab pada hakekatnya setiap upaya pembaharuan pendidikan akan dikembangkan melalui SD inti dan ditularkan kepada SD imbas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun peserta tambahan pada program KKG pelatihan guru inspiratif ini adalah sebagai berikut :

Table 1.4
Peserta Tambahan KKG
Pelatihan Guru Inspiratif

No	Nama Sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 003 Tembilahan Hulu	1 Orang
2.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 006 Muhammadiyah	2 Orang
3.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 013 Tembilahan Hilir	1 Orang
4.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tembilahan Hilir	2 Orang
5.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 012 Tempuling	1 Orang
6.	Sekolah Dasar Negeri Nomoe 021 Sebrang Tembilahan	1 Orang

Sumber Data : KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan

Pada Tabel 1.4 menjelaskan tentang tambahan Peserta kegiatan KKG pelatihan guru inspiratif, yang mana pada peserta tambahan ini ikut serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan bisa ikut belajar dalam KKG yang dilaksanakan di Gugus H. Said.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana manajemen sumber daya manusianya dalam meningkatkan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 ini diterapkan dalam setiap sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian Denga judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS H. SAID PADA MASA PANDEMI DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said pada masa pandemi di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said pada masa pandemi di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya kajian mengenai bagaimana implementasi program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said pada masa pandemi di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

2. Manfaat praktis

Diharapkan bagi sekolah lain dan siswa lain dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kinerja guru di sekolahnya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 3 (tiga) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan, analisis data dan validasi data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah SDN 009 Tembilahan Kota yang sekaligus menjadi SD inti Gugus H. Said, visi dan misi, maksud dan tujuan Gugus, susunan pengurus KKG Gugus H. Said, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian, membahas mengenai Implementasi Program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang dapat disumbangkan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing – masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye 1975, (Syafie 2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”. Dye (Harbani Pasolong, 2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich (Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Namun demikian, satu hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson 1969, (Winarno 2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Amir Santoso 1993, (Winarno 2007: 19), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu:

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bisa diramalkan. Lebih lanjut, Effendi (Syafiie 2006: 106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai:

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebabsebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakantindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

2.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Easton (Suharno 2013:14-15), ciri kebijakan publik yang utama yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan – urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan – urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan – tindakan

tertentu. Implikasi dari pernyataan diatas menyimpulkan bahwa ciri – ciri kebijakan publik adalah:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat – pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn (Suharno 2013:22-23) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

c. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit – unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Anderson (Suharno

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2013:25-26), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1) Formulasi masalah (*problem formulation*)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan.

2) Formulasi kebijakan (*formulation*)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

3) Penentuan kebijakan (*adaption*)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

4) Implementasi (*implementation*)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka lakukan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5) Evaluasi (*evaluation*)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan?

Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan penerapan. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli yang dikutip dalam buku (Harbani Pasolong, 2008). Implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hingga mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Dalam rangka proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lain terkait satu dengan lainnya, perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melengkapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, jadi implentasi itu merupakan tindakantindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat.apalagi sampai merugikan masyarakatsanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatankegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara etimologis pengertian Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to Implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hnggis (dalam Harbani Psolong,2008- 57) Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber lain untuk mencapai sasaran strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrumen baik SDM, SDA, dan lainnya, yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Nugroho (Arifin Tahir , 2014:55) mendefenisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menrut Arifin Tahir implementasi meupakan suatu prosesuntuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Sedangkan Van Meter Horn (Agustino, 2006; 139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan. Menurut Lester dan Stewart (Agustino, 2006;139) Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output), maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output) yang tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi didefinisikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan.

2.1.1. Implementasi Model Gorge C. Edward III

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah ‘sumber daya’. Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 138), dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Staf

sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu :

(i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Efektifitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain , efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C Edward III (Leo Agustino, 2016 : 139) adalah :

1. Pengangkat Birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif

merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016 : 140) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik

adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 141) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

1. Membuat standar operating procedures (SOP)

SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatankegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

2. Fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Program Kelompok Kerja Guru (KGG)

2.3.1. Pengertian Kelompok Kerja Guru

Kelompok Kerja Guru (KKG), adalah suatu organisasi profesi guru yang bersifat non struktural yang, dibentuk oleh guru-guru di Sekolah Dasar, di suatu wilayah atau gugus sekolah, sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran.

Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan professional guru, pelatihan dan tukar menukar informasi, dalam suatu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Ginting, 2004 : 21)

Menurut Trimio (2007:12) Kelompok Kerja Guru yaitu suatu organisasi profesi guru yang bersifat struktural yang dibentuk oleh guru-guru di suatu wilayah atau gugus sekolah sebagai wahana untuk saling bertukaran pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran.

Dari pengertian tersebut di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa kelompok kerja guru adalah ajang perkumpulan untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar sehingga guru tersebut lebih profesional dan meningkatkan mutu dari proses pembelajaran itu sendiri.

2.3.2. Dasar Hukum Kelompok Kerja Guru

Adapun dasar hukum Kelompok Kerja Guru di Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 070/C/Kep/I/1993 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Guru Kelas.
2. Pertimbangan
 - a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Inhil Nomor Kpts.027/Disdik/III/2021 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said Periode 2021-2025;
 - b. Proposal Kegiatan Guru AKM Assesment Gugus H. Said dengan Tema “Membentuk Pribadi Guru yang Menginspirasi”.
 - c. Rapat Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tanggal 29 Juli 2021;
 - d. Rapat Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said tanggal 7 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3.3. Tujuan Kelompok Kerja Guru

Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Sriwasono (2010:2) menyatakan bahwa tujuan umum mengembangkan kegiatan di KKG/MGMP untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan pendidikan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional. Menurut Standar Pengembangan KKG/MGMP Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2008:4-5) tujuan KKG/MGMP adalah:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.
2. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
4. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme.

5. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.

6. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP.

Menurut penjelasan di atas bahwa tujuan KKG adalah meningkatkan mutu kompetensi guru sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2.3.4. Manfaat Kelomok Kerja Guru

Beberapa manfaat dengan diadakannya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) menurut Standar Pengembangan KKG/MGMP Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2008:4-5), secara umum dan garis besar dapat memberikan manfaat kepada guru yaitu:

1. Sebagai tempat pembahasan dan pemecahan masalah bagi para guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Sebagai wadah kegiatan para guru yang tergabung dalam satu gugus yang ingin meningkatkan profesionalnya secara bersama-sama.
3. Sebagai tempat penyebaran informasi tentang pembaharuan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan usaha peningkatan hasil belajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Sebagai pusat kegiatan praktek pembuatan alat peraga, penggunaan perpustakaan serta perolehan berbagai keterampilan mengajar maupun pengembangan-pengembangan administrasi kelas.

5 Memberikan kesempatan kepada guru yang kreatif dan inovatif untuk berbagi pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan profesional kepada sesama teman sejawat dan mendiskusikan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam usaha meningkatkan mutu pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keterampilan.

2.3.5. Hakikat Kelompok Kerja Guru

Menurut Mulyasa (2006 : 145), Hakikat Kelompok Kerja Guru meliputi :

1. Pemecahan masalah pembelajaran
2. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar peserta didik
3. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan orang tua peserta didik
4. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan komite sekolah
5. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan masyarakat
6. Pemecahan masalah yang dihadapi guru terutama dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP,
7. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar proses
8. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi simulasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Pemecahan masalah Sistem Informasi Manajemen SIM sekolah yang berkaitan dengan penyampaian informasi penting untuk diketahui guru dan tenaga kependidikan lainnya

10 Pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyusunan materi pembelajaran secara rinci

11 Pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif PAIKEM

12 Pemecahan masalah yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran.

jadi hakikat KKG yaitu memecahkan masalah dalam pembelajaran baik dari perencanaan program pembelajarannya, saat proses pembelajaran berlangsung, juga masalah guru dalam mengajar dan pengembangan hasil penataran atau workshop serta pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran.

Implementasi dari ruang lingkup diharapkan mampu menghasilkan guru yang bermutu dan profesional. Menurut studi Balitbang Dikbud seperti dikutip Fattah (2009:59), dinyatakan bahwa guru yang bermutu dapat diukur dari lima hal yang utama yaitu :

- 1 Kemampuan profesional
- 2 Upaya profesional
- 3 Kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan professional
- 4 Kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaan.
- 5 Kesejahteraan yang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Pengorganisasian Kelomok Kerja Guru

Secara organisatoris maupun sebagai wadah pembinaan professional, wadah gugus terdiri dari komponen-komponen antara lain :

1. Kelembagaan / Intitusi

Kelembagaan institusi lihat dari sudut ini kumpulan gugus terdiri atas:

a. SD inti

SD inti adalah satu listnya yang dipilih diantara anggota Gugus yang mempunyai peranan sebagai pusat pengembangan pada tingkat Gugus dan secara Institusional memiliki sarana dan prasarana serta tenaga Kependidikan atau guru yang menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di tingkat Gugus tersebut

Kriteria SD inti antara lain :

1. Guru dan kepala sekolah mempunyai keinginan dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan profesional nya.
2. SD inti harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut, misalnya halaman atau tanah luas, gedung dan perabot sekolah layak.
3. Letaknya strategis dan mudah terjangkau oleh SD imbas.
4. Jenjang kelas dan guru nya lengkap.

SD inti sebagai SD yang mendapat kepercayaan untuk melakukan koordinasi pada suatu Gugus mempunyai fungsi :

1. Sebagai pusat kegiatan dan pusat informasi bagi SD Imbas yang tergabung dalam Gugus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merupakan SD percontohan bagi SD imbas anggota Gugus nya.
3. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan Gugus untuk kepentingan seluruh anggota Gugus nya.
4. Sebagai pusat informasi dalam pengembangan pendidikan dalam satu Gugus.
5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua siswa, agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan.

b. SD Imbas

SD imbas adalah sekolah yang menjadi anggota suatu Gugus. SD imbas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem Gugus, sebab pada hakikatnya setiap upaya Pembaharuan pendidikan akan dikembangkan melalui SD inti dan ditularkan kepada SD imbas, baik inovasi yang berhubungan dengan KBM atau PBM maupun hal-hal yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan pendidikan itu sendiri. Kebalikannya bahwa SD inti pun harus mampu menyerap dan mengembangkan aspirasi maupun hal positif yang terdapat di SD imbas. Dengan demikian ada kebersamaan untuk saling menerima dan memberi demi kemajuan bersama.

SD Imbas sebagai wadah anggota suatu gugus mempunyai fungsi :

1. Menerima informasi untuk peningkatan mutu dari SD inti dan melaksanakannya di sekolah masing-masing.
2. Memberikan informasi kepada SD inti tentang gagasan dan kiat yang perlu dikembangkan.

3. Menjalin kerjasama dengan SD inti dan sesama SD imbas lainnya dalam upaya peningkatan mutu.
4. Berusaha meningkatkan diri dan Berpacu secara kompetitif.
5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua siswa agar dapat berpartisipasi dalam pendidikan.

2. Kepengurusan KKG

Menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP (2010:9) Bab II Penyelenggaraan KKG dan MGMP pada Pasal 7 disebutkan Pengurus KKG dan MGMP Kelompok Kerja Guru, yaitu organisasi KKG atau MGMP dalam pelaksanaan kegiatan memiliki kepengurusan organisasi dengan contoh sebagai berikut :

1. Ketua KKG/MGMP merangkap anggota
2. Sekretaris KKG/MGMP merangkap anggota
3. Bendahara KKG/MGMP merangkap anggota
4. Bidang-bidang kepengurusan merangkap anggota
5. Anggota

Jadi struktur pengorganisasian didalam KKG, pengurus KKG yang sudah terbentuk atau terpilih juga sebagai anggota KKG. Keanggotaan dan Kepengurusan KKG dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota KKG. Didalam penentuan kepengurusan KKG. perlu memperhatikan kesetaraan gender. Penetapan pengurus dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anggota KKG berasal dari sekolah negeri maupun swasta, atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat yang merupakan guru kelas;
2. Keanggotaan KKG diawali dengan mengisi biodata peserta, yang selanjutnya setelah diisi diserahkan ke pengurus KKG;
3. Pengurus menghimpun biodata anggota KKG sebagai database keanggotaan KKG diwilayahnya;
4. Ketua KKG dipilih oleh anggota dalam rapat anggota dan diserahkan ke induk organisasi pendidikan;
5. Setelah pemilihan Ketua KKG, selanjutnya dilakukan penyusunan kepengurusan KKG, meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang kepengurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Kelompok Kerja Guru (KKG);
6. Setelah pengurus terpilih, dan kepengurusan KKG telah lengkap selanjutnya, selanjutnya ketua terpilih mengusulkan susunan pengurus KKG kepada induk organisasi pendidikan untuk disahkan;
7. Kepengurusan KKG memiliki masa kerja selama tiga tahun atau sesuai dengan kesepakatan bersama dan dapat dipilih kembali setelah masa kerja selesai.

Dari uraian di atas, pembentukan kepengurusan KKG dilakukan oleh semua anggota dalam memilih ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang kepengurusan lainnya dan diajukan ke induk organisasi untuk disahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Pengelolaan Kelompok Kerja Guru

Menurut Dirjen PMPTK (2010:5) bahwa pengelolaan KKG meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

a. Perencanaan kegiatan

Pada tahap perencanaan ini, pengurus KKG menyusun visi, misi, tujuan dan rencana kegiatan. Visi merupakan hasil yang diharapkan terwujud dari terselenggaranya KKG, misi merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk mewujudkan visi, tujuan yang diperoleh dengan adanya KKG dengan adanya visi dan misi dari kegiatan KKG. Selanjutnya menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu.

b. Pengorganisasian kelompok kerja guru (KKG)

Struktur organisasi KKG berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Semua anggota mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi KKG.

c. Pelaksanaan kegiatan KKG

1. Berdasarkan kepada rencana kerja tahunan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Memperhitungkan sumber pendanaan yang dimiliki KKG.

d. Evaluasi kegiatan KKG

1. Pengurus mengevaluasi setiap kegiatan sebagaimana yang tertera pada rencana program tahunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus melaporkan pelaksanaan program dan mempertanggung jawabkan pada rapat pengurus serta anggota dalam bentuk laporan yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Laporan yang telah dipertanggungjawabkan disampaikan ke ketua kedinasan kecamatan.

Evaluasi kegiatan KKG terdiri dari :

- a. Pengurus mengevaluasi setiap kegiatan sebagaimana yang tertera pada rencana program tahunan;
- b. Pengurus melaporkan pelaksanaan program dan mempertanggungjawabkannya pada rapat pengurus serta anggota dalam bentuk laporan akhir tahun pelajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Laporan yang telah dipertanggungjawabkan disampaikan ke Ketua Kedinasan Kecamatan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan KKG mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi.

2.3.8. Pembiayaan Kelompok Kerja Guru

Menurut Pedoman Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pembiayaan KKG merupakan salah satu bagian vital untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Pembiayaan KKG dapat diperoleh dari :

1. Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah melalui dana dekonsentrasi memfasilitasi dukungan operasional untuk kegiatan KKG

2. Partisipasi dan gugus KKG

Bentuk, besar dan frekuensi partisipasi gugus untuk mendukung terselenggaranya program kerja KKG ditentukan secara musyawarah dan diketahui oleh pembina

3. Dana hasil usaha kegiatan KKG

Dapat melakukan usaha pencarian dana untuk menunjang kegiatan KKG, dengan kegiatan anak, koperasi yang membantu pengadaan alat permainan edukatif, buku kegiatan, buku administrasi dsb, dana yang diperoleh dari kegiatan lomba, seminar, workshop, atau kegiatan lain yang dikelola KKG.

4. Dana dari lembaga/instansi dan masyarakat

Dana dari lembaga atau instansi dapat diperoleh apabila ada program yang memungkinkan dilaksanakan oleh KKG.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembiayaan KKG dapat diperoleh dari pemerintah, anggota KKG, hasil usaha KKG, lembaga atau instansi dan masyarakat.

2.1 Pandangan Islam Tentang Guru

Dalam perspektif pendidikan islam, keberadaan, peranan dan fungsi guru merupakan keharusan yang tidak dapat diingkari. Tidak ada pendidikan tanpa kehadiran guru. Guru merupakan penentu arah dan sistematika pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana, bentuk pola sampai kepada usaha bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik dan benar dalam rangka mengakses diri akan

pengetahuan dan nilai-nilai hidup. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam sistem pendidikan untuk membantu proses perkembangan siswa.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Guru termasuk manusia yang berjiwa besar di dunia ini, ia berusaha menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mentransferkan ilmu pengetahuan dan juga memiliki posisi sebagai pewaris nabi. Oleh karena itu Islam memberikan penghargaan sangat tinggi terhadap guru. Ia adalah salah satu pemilik ilmu pengetahuan. Tingginya kedudukan guru dalam Islam, menurut Ahmad Tafsir, tak bisa dilepaskan dari pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber pada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 32 :

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

artinya: Mereka menjawab, Mahasuci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui (lagi) Maha Bijaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingginya kedudukan guru dalam Islam masih dapat disaksikan secara nyata pada masa sekarang ini, terutama di pesantren-pesantren Indonesia, santri tidak berani menatap sinar mata Kyai, membungkukkan badan sebagai tanda hormat kepada sang Kyai tatkala menghadap ataupun berpapasan, tawadu' dan sifat baik lainnya.

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu pendidikan. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan, perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru, baik dalam segi kuantitas (jumlah) maupun kualitasnya (mutu). Oleh karena itu, guru merupakan seorang figur yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Karena peranannya yang begitu besar, maka seorang guru disyaratkan mempunyai kompetensi paedagogik, professional, kepribadian, dan sosial.

Al-Ghazali menegaskan bahwa kedudukan yang tinggi yang diduduki oleh orang yang berpengetahuan bahwa orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuannya adalah orang besar disemua kerajaan langit, dia seperti matahari yang menerangi alam, ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain karena ia memang wangi. Dijelaskan pada QS. Al-Mujadilah :11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:

“Berilah kelapangan dalam majelis-majelis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari pandangan itu, dipahami bahwa tugas guru merupakan pewaris Nabi (warasat alanbiya), yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil’alamin (membawa rahmat bagi seluruh alam), yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal sholeh dan bermoral tinggi.

Mengapa guru diposisikan sebagai profesi yang begitu mulia? Karena guru adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Swt dan dengan ilmunya itu dia menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapatkan, memperoleh serta menuju kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik muridnya untuk menjadi manusia beradab. Sebagai orang yang mengemban tugas mulia tentunya guru harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, tidak serta merta mengajar seadanya, apalagi menjadi guru hanya untuk tujuan karier.

Profesi guru bukanlah profesi main-main, artinya sekali seseorang memilih profesi guru maka ia harus bertanggung jawab untuk mendidik muridnya dengan baik. Karena itu guru harus profesional atau mengupayakan diri menjadi profesional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti tentang implementasi program Kelompok Kerja Guru di sekolah dasar pada masa pandemi di kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ayu Wijayanti, “Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui KKG (Kelompok Kerja Guru) Di SDN 02 Genengan” (Skripsi, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2018).	Penelitian yang dilakukan oleh Ratna ini berfokus pada bentuk pengembangan kompetensi profesionalitas guru dalam KKG yang menjelaskan cara mengembangkan potensi profesionalisme guru di SD melalui program KKG dan menjelaskan pentingnya KKG dalam meningkatkan profesionalitas guru..	Adapun kesamaan penelitian yaitu, meneliti tentang pelaksanaan kelompok kerja guru	Adapun perbedaan penelitian yaitu, lokasi penelitian yaitu di Sekolah Dasar pada masa pandemi covid 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	<p>Penelitian dari Puji Maliki, “Strategi Kelompok Kerja Guru Dalam Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Kota Batu” (Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2018).</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Puji ini berfokus pada strategi kegiatan KKG didalam meningkatkan kinerja guru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, pelatihan-pelatihan dan memberikan berbagai bimbingan pembelajaran. Kendala yang ditemukan adalah kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kemampuan guru, dan sering bergantinya kurikulum.</p>	<p>Adapun kesamaan penelitian yaitu, meneliti tentang pelaksanaan kelompok kerja guru</p>	<p>perbedaan penelitian yaitu, lokasi penelitian yaitu di Sekolah Dasar pada masa pandemi covid 19</p>
3.	<p>Penelitian dari Berlian R, “Efektifitas Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Meningkatkan Kemampuan Pembelajaran (Studi Pada Kegiatan Kerja Guru Gugus III Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)” (Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Teknologi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Berlian ini berfokus pada efektifitas kegiatan KKG dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran guru terlihat dari evaluasi perencanaan pembelajaran guru sebelum dan sesudah diadakan KKG yang meliputi penentuan bahan pembelajaran, tujuan pembelajaran, pengembangan materi, media, dan sumber belajar, serta</p>	<p>Adapun kesamaan penelitian yaitu, meneliti tentang peembahasan kelompok kerja guru</p>	<p>perbedaan penelitian yaitu, lokasi penelitian yaitu di Sekolah Dasar pada masa pandemi covid 19</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu, 2014).	merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, menyiapkan prosedur, jenis dan alat penilaian.		
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi Konsep

- a. Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.
- b. Defenisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kelompok Kerja Guru (KKG), adalah suatu organisasi profesi guru yang bersifat non struktural yang, dibentuk oleh guru-guru di Sekolah Dasar, di suatu wilayah atau gugus sekolah, sebagai sarana untuk saling bertukar pengalaman guna meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran.
- d. hakikat Kelompok Kerja Guru (KKG) yaitu memecahkan masalah dalam pembelajaran baik dari perencanaan program pembelajarannya, saat proses pembelajaran berlangsung, juga masalah guru dalam mengajar dan pengembangan hasil penataran atau workshop serta pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis dari variabel tersebut, maka peneliti menggunakan indikator-indikator untuk melakukan pengukuran implementasi program kelompok kerja guru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Publik (George Charles Edward III)	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Staf Pelaksana 2. Informasi 3. Kewenangan
	Sikap Pelaksana (Disposisi)	1. Staffing Birokrasi 2. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. Prosedur Operasional Baku 2. Fragmentasi

Sumber : Leo Agsutino (2006 : 7)

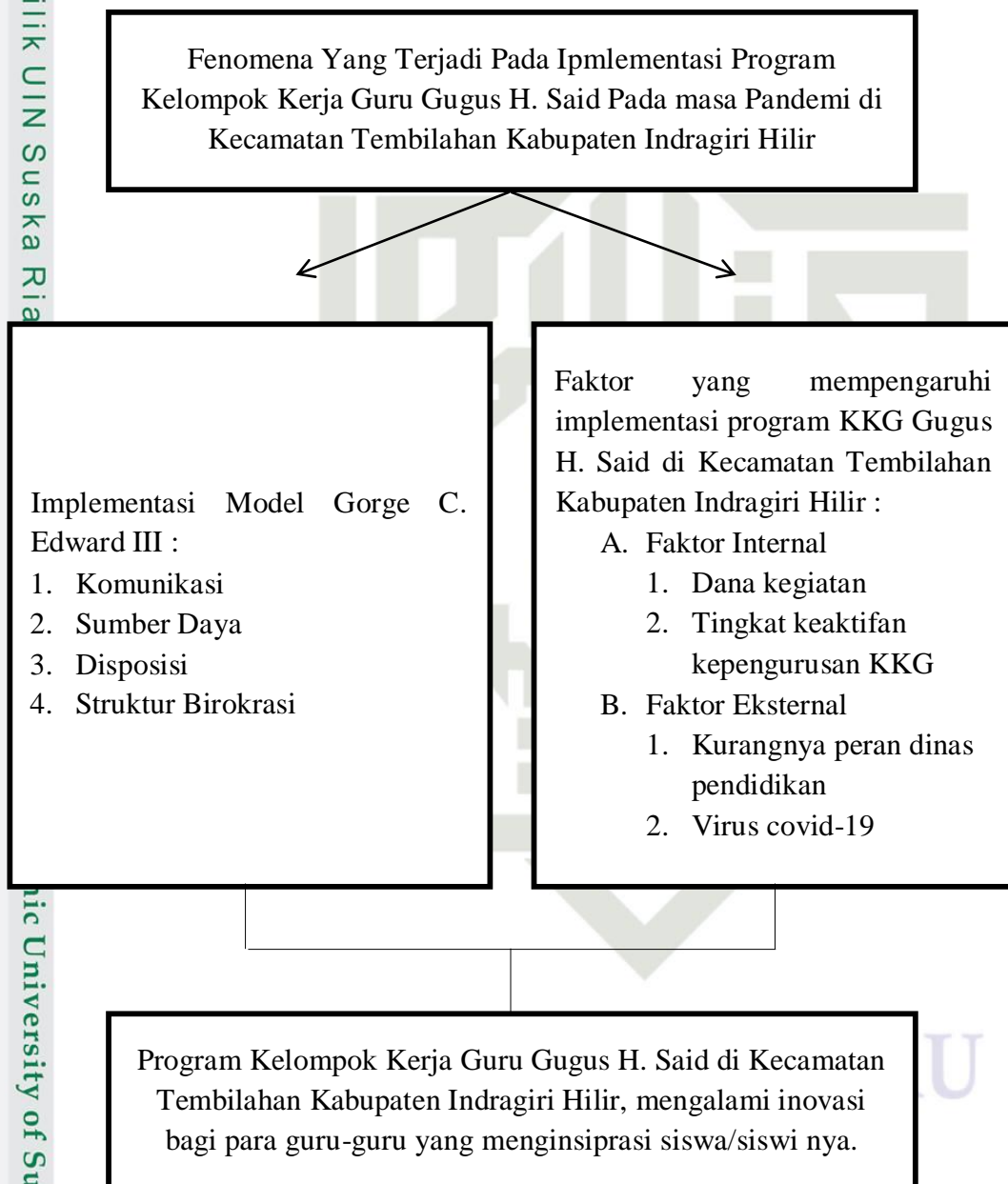
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Indikator Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpul data, menganalisis data dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010). Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2011).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan pengambilan data 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Gugus H. Said yang terletak di SDN 009 Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung ditempat penelitian dengan mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu berupa tanya jawab langsung (wawancara), dan observasi langsung dengan ketua KKG, Ketua Gugus KKG H. Said, dan Jajaran pelaksanaan kelompok kerja guru di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Data skunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikanto (2013) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Penulis memilih beberapa informan untuk diminta data berupa jawaban mengenai implementasi Program Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, informan yang dipilih adalah Ketua KKG, Ketua KKG Gugus H. Said, dan Narasumber Kelompok Kerja Guru.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Kategori
1	Ketua KKKS	1
2	Ketua KKG	1
3	Narasumber KKG	1
4	Guru	3
Jumlah		6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan :

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain wawancara yaitu dokumentasi (sumber data skunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (sugiyono, 2011). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah.

3.6 Analisa Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Kelompok Kerja Guru

Agus H. Said di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada masa pandemi.

3.7 Validasi Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya.

Mengatakan bahwa Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada beberapa macam triangulasi data menurut Denzin dalam Lexy Moleong (2004 : 330) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. (Ma'rifah, 2014)

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi penyidik

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah

Gugus H. Said ini Terletak di SDN 009 Tembilahan Kota, awalnya sebelum nama Sekolah Dasar Negeri 009 Tembilahan Kota, Nama SD tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri 008 Tembilahan Kota. Perubahan ini di karenakan adanya pemekaran kecamatan tahun 2008, Kecamatan Tembilahan menjadi Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kecamatan Tembilahan Kota. Perubahan ini dari gagasam pemerintah kabupaten Indragiri Hilir Dinas oleh Penidikan kabupaten Indragiri Hilir.

Sekolah Dasar Negeri 009 Tembilahan Kota berdiri sejak tahun 1976-an, pada waktu itu gedungnya hanya satu unit dan kelasnya ada enam, tahun 1986 Sekolah Dasar Negeri 008 atau SDN 009 Tembilahan Kota nama sekarang, Sekolah ini di renovasi total yang awalnya gedung yang satu unit menjadi dua unit kedua mempunyai satu lantai, kelasnya pun berubah menjadi Sembilan kelas yang terdiri I, II, III, IV, dan unit kedua kelas V dan VI.

Sekolah SDN 009 ini terpilih sebagai sekolah INTI di KKG gugus H. Said di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan sekaligus menjadi wadah dimana gugus H. Said ini terletak. Dan ada beberapa sekolah dasar juga yang menjadi SD IMBAS, yang mana SD itu adalah sebagai berikut :

- 1 Sekolah Dasar Nomor 023 Tembilahan
- 2 Sekolah Dasar Nomor 019 Sungai Beringin
- 3 Sekolah Dasar Nomor 011 Pekan Arba
- 4 Sekolah Dasar Nomor 012 Tembilahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Sekolah Dasar IT Faturrahman Tembilahan

SD imbas ini adalah sekolah yang menjadi anggota suatu gugus. SD imbas ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem gugus. Sebab pada hakekatnya setiap upaya pembaharuan pendidikan akan dikembangkan melalui SD inti dan ditularkan kepada SD imbas.

4.1.1. Visi dan Misi KKG Gugus H. Said

Visi :

Bekerja secara interaktif, kreatif, inovatif, kompetitif, dan dinamis menuju guru yang professional

Misi :

1. Meningkatkan dan mengembangkan seluruh aspek kompetensi guru secara holistik sebagai momentum yang baik untuk melaksanakan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman;
2. Menyiapkan guru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah, kreatif, serta memiliki motivasi yang kuat dalam berkarya;
3. Mewujudnyatakan paradigma pembelajaran yang inovatif, efisien, efektif, produktif, dan demokratis agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif, aktif, dan menyenangkan;
4. Mengembangkan potensi guru secara optimal dan proporsional dalam menggunakan multimedia dan multi metode dalam proses pembelajaran;
5. Meningkatkan kemampuan dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya serta mampu mengimplementasikan dan mengembangkan dalam logika, estetika dan praktika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2. Maksud dan Tujuan

Secara terperinci maksud dan tujuan pelaksanaan Program Pelatihan Guru Inspiratif "Membentuk Pribadi Guru yang Menginspirasi" adalah sebagai berikut:

a. Maksud

1. Terbangunnya pola pemikiran untuk mengembangkan metode pendidikan yang mengintegrasikan kecerdasan akademik dengan kecerdasan emosi dan akhlak.
2. Mengembangkan budaya bertukar ilmu, wawasan dan pemikiran.

b. Tujuan

1. Membentuk pribadi guru teladan (Qualified Teacher)
2. Membantu guru lebih mengenali kekuatan dan kelemahan diri atas potensi yang dimilikinya.
3. Membantu guru untuk menemukan dan merawat motivasi hakiki sehingga memperoleh kekuatan ruhiyah untuk melaksanakan tugasnya.
4. Membantu guru menjadi guru inspirasi.

4.3. Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said

A. Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Gugus H. Said

Peranan K3S terhadap sekolah sendiri adalah untuk menyamakan persepsi, merekomendasikan hal-hal yang telah disepakati dan sebagai penanggungjawab Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam melaksanakan program kerja KKG. Sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan untuk memotivasi setiap kegiatan K3S, memfasilitasikan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan K3S, melakukan pembinaan dan mengawasi setiap kegiatan K3S serta mengevaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program-program kerja yang dibuat dan dilaksanakan K3S. Adapun susunan pengurus kelompok kerja kepala sekolah gugus h. said di kecamatan tembilahan adalah sebagai berikut :

Table 4.1
Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah
Gugus H. Said

No	Jabatan Dalam Gugus	Nama	Tempat Tugas
	KETUA	HALIDI, S.Pd	SDN 009 TEMBILAHAN KOTA
	SEKRETARIS	AHMAD AFFANDI, S.Pd, M.Pd	SDN 023 TEMBILAHAN
III	BENDAHARA	TAUFIK, M.Pd	SDN 019 SUNGAI BERINGIN
IV	ANGGOTA	HJ. MARZUMIAH, S.Pd	SDN 011 PEKAN ARBA
		FAHYUTI, S.Pd	SDN 012 PEKAN ARBA
		SUPRIYADI, S.Pd.I	SD IT FATHUR RAHMAN

Sumber Data : KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan

Pada table 4.1 menjelaskan tentang kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Gugus H. Said di Kecamatan Tembilahan, ini sudah di putuskan dan diadakan SK dari kepala dinas pendidikan Kab. Inhil Nomor KPTS. 127/ DISDIK/III/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 periode 2021-2025.

B Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said

KKG memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi struktural pada umumnya. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator mata pelajaran atau koordinator tema dan anggota. Ketua KKG bertugas membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek selama kurun masa menjabat. Ketua juga melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk melaporkan kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan, sedang dan telah dilakukan pada KKG yang diampunya. Pelaporan dilakukan berjenjang melalui pengawas sekoah yang ditugaskan untuk mendampingi beberapa KKG. Sekretaris bertugas mencatat hasil rapat dan menyebarkan kepada anggota KKG dan sekolah-sekolah di gugus terkait. Bendahara bertugas untuk mengelola dana yang didapatkan KKG dari iuran anggota dan atau hibah dari dinas pendidikan. Adapun susunan kepengurusan Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru
Gugus H. Said

No	Jabatan Dalam Gugus	Nama	Tempat Tugas
I	PENANGGUNG JAWAB	KETUA GUGUS H. SAID	
II	KETUA	SUSANTI, S.Pd	SDN 023 TEMBILAHAN
III	SEKRETARIS	MUSDALIF, SE	SD IT FATHUR RAHMAN
IV	BENDAHARA	RENI HASNITA, S.Pd	SDN 011 PEKAN ARBA

Sumber Data : KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan

Pada table 4.2 menjelaskan tentang kepengurusan Kelompok Kerja Kerja Guru Gugus H. Said di Kecamatan Tembilahan, ini sudah di putus dan dijadikan SK dari kepala dinas pendidikan Kab. Inhil Nomor KPTS. 127/ DISDIK/III/2021 pada tanggal 01 Maret 2021 periode 2021-2025.

C. Susunan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said

- a. Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

Tabel 4.5
Susunan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Gugus H. Said

No	Jabatan Dalam Gugus	Nama	Tempat Tugas
1	Koordinator	Ekariansyah, S.Pd	SDN 012 Pekan Arba
2	anggota	Muslina, S.Pd. SD	SDN 023 Tembilahan
3		Asni Wirna, S.Pd	SDN 019 Sungai Beringin

Sumber Data : KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan

Pada table 4.5 menjelaskan tentang hubungan masyarakat dan kerjasama gugus H. Said, Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan program kerja bidang humas dan kerjasama. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada Ketua. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Bekerjasama dengan pengurus lainnya untuk kelancaran dan keberhasilan program KKG sesuai kebutuhan.

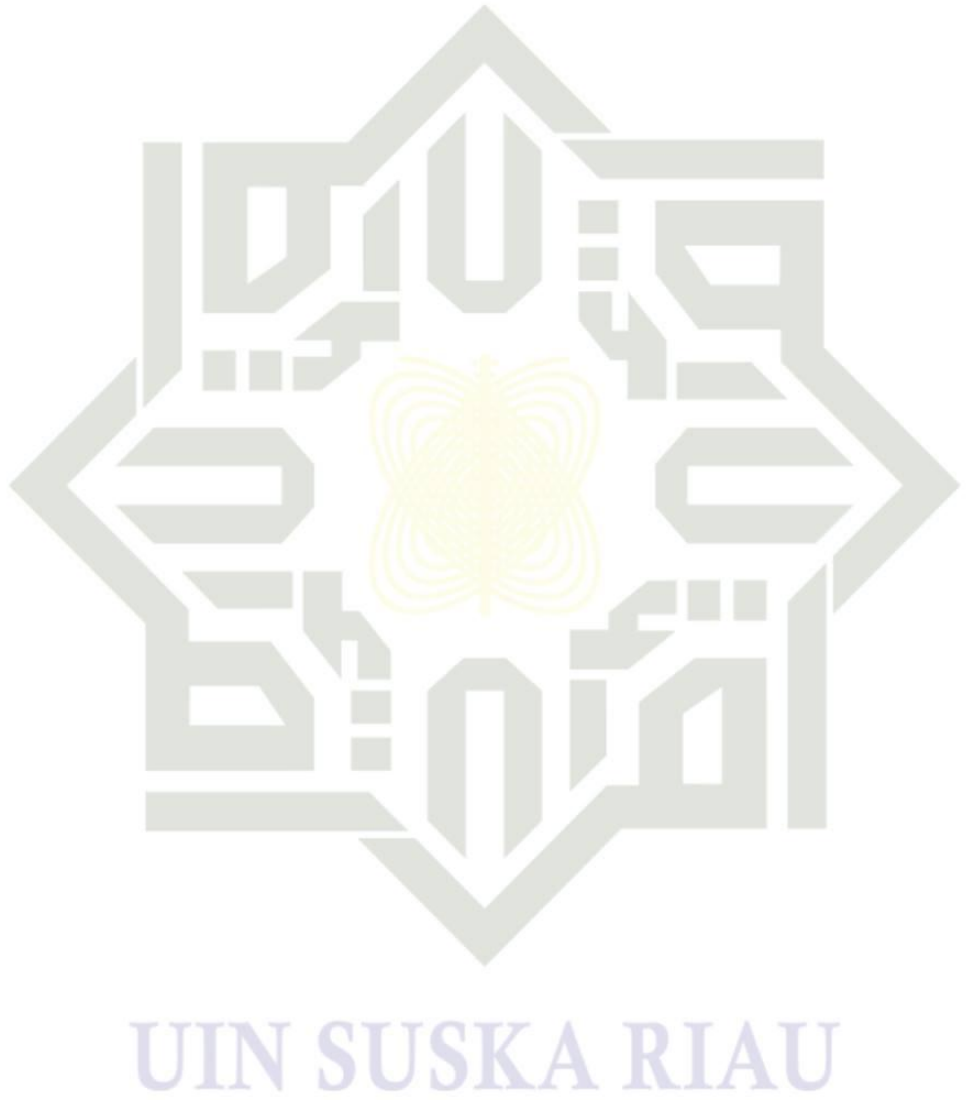
4.1.4. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Guru Gugus H. Said

KKG memiliki struktur kepengurusan seperti halnya organisasi lain. adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

1. Terdiri dari pengurus dan anggota.
2. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga ketua bidang. Bidang yang dimaksud adalah
 - a. Bidang perencanaan dan pelaksanaan program.

- b. Bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana, dan prasarana.
- c. Bidang hubungan masyarakat dan kerjasama.

Berikut adalah gambar struktur organisasi di KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir :



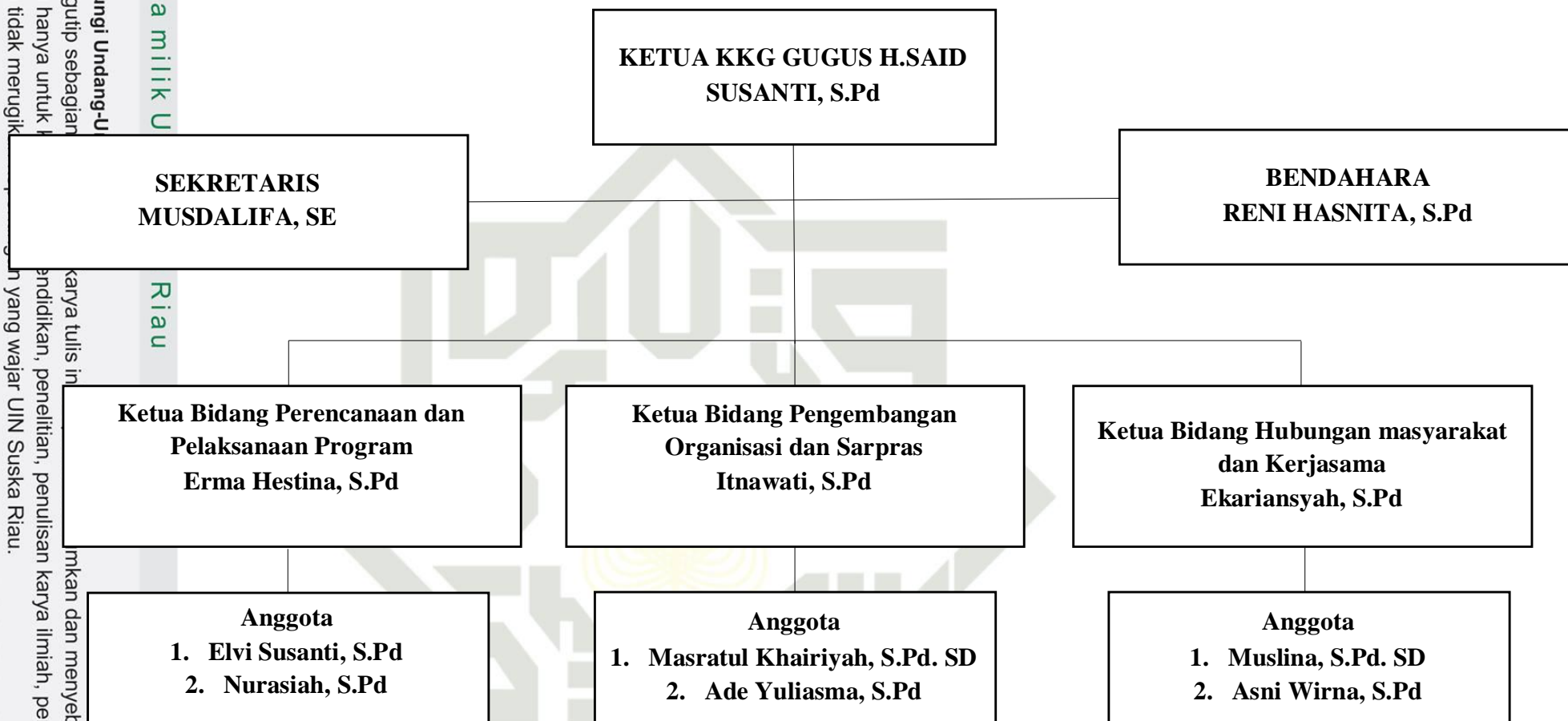
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KKKS (K3S) Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan



Gambar 4.2
Struktur Organisasi KKG Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Dengan adanya Implementasi Program KKG di Gugus H. Said Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Pelatihan Guru Inspiratif akan mengantarkan seorang guru untuk menjadi lebih percaya diri menggunakan kemampuan yang ada untuk peningkatan mutu pendidikan. Penerapan program ini juga mampu memberikan manfaat dan menciptakan sebuah jalinan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (guru dan siswa). Dan terbentuknya forum pembelajaran guru yang memfasilitasi lebih lanjut kagiatan peningkatan kompetensi dan kreatifitas guru pada tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Serta Kepemilikan Sertifikasi Tanda Komptensi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Ada beberapa saran yang saya masukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan, terutama Kepala Dinas Pendidikan Kab. Inhil, setiap program itu selalu tergantung dengan dana, selain gugus ini dapat perhatian dari kepala dinas, gugus ini juga perlu support dana dari dinas pendidikan, agar tercapainya dan kenyamanan bagi pelaksana dan peserta dalam melaksanakan kegiatan di Gugus H. Said.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Bagi Kepengurusan Gugus, terutama seluruh kepengurusan K3S dan kepengurusan KKG yang ada di Gugus H. Said. Rutinitas gugus harus sering di adakan, dan selalu aktif dalam komunikasi dan saling berbagi pengalaman kepada guru-guru agar terciptanya belajar dalam keadaan nyaman dan belajar dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih cerdas.

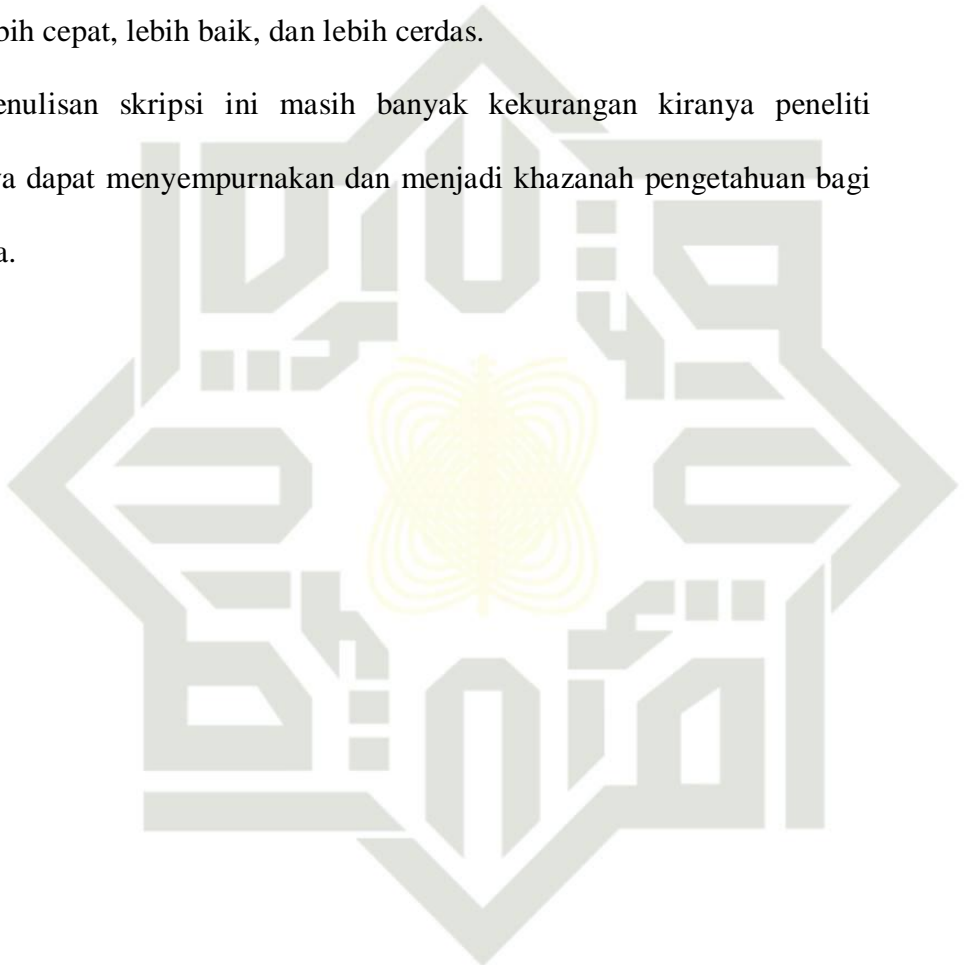
3 Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan kiranya peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan dan menjadi khazanah pengetahuan bagi kita semua.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdorrahman Ginting, 2004. *Proposal Pengajuan Dana Pembinaan KKG Padang Barat*, (Padang: SD CA Padang)
- Al-Qur'an Karim
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar, 1996, *Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah*, Proyek Peningkatan Mutu SD, TK, dan SLB, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khasanah, L. P., Sumarsih, & Yulidesni. (2018). Implementasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Pelaksanaan Tugas Guru. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 3(1), 34–37.
- Ma'rifah, I. (2014). *Validasi penelitian kualitatif*.
- Mulyasa. (2006). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabeta. Pressindo. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Permendiknas Nomor 16 *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 *tentang Standar Pengelola Pendidikan*
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 *tentang Standar Isi*.
- Pusdiklat Kemdikbud. (2020). *SURAT EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 1 9) - Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. <https://Pusdiklat.Kemdikbud.Go.Id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sibarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Alokasi*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Cetak XVI
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sharto, Edi. 2007. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: Gadjamada university Press.
- Surat Dierektor Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 070/C/Kep/I/1993 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Guru.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta :
- Triton Pb. 2007. *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan Dan Bisnis*, Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Yogyakarta : Pelajar Pustaka.
- TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 1 9) - Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
<https://Pusdiklat.Kemdikbud.Go.Id/>.

LAMPIRAN

Dokumentasi pada saat wawancara bersama kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

Wawancara Bapak Halidi, S. Pd ketua K3S



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bapak Ahamad Affandi, S. Pd, M. Pd Narasumber KKG



Wawancara Ibu Susanti, S. Pd ketua KKG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HDUP



ASMI PURWANDI di lahirkan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Juli 2000. Lahir dari pasangan Sahril dan Irnawati dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Memulai jenjang pendidikan pada tahun 2006 menempuh sekolah dasar di SDN 010 Tembilahan Hulu, pada tahun 2012 melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Tembilahan Hulu, pada tahun 2015 menempuh pendidikan sekolah menengah atas di MAN 1 Inhil dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Ketika menduduki bangku sekolah menengah atas MAN 1 Inhil, Penulis pernah menjadi pemain futsal terbaik antar seluruh sekolah yang ada di Inhil dan pernah mendapat peringkat dua lomba sholawat nariyah mewakili sekolah MAN 1 Inhil. Dan pernah menjuarai LIGA FUTSAL INHIL 2021 mendapat juara satu.

Penulis pernah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pekan Kamis sebagai wakil ketua. Kemudian, penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus H. Said Pada Masa Pandemi di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”.